

ASPIRASI *kita*

***ANGGOTA FRAKSI PKS Jatim
Beri Selamat Pemimpin Baru PKS:
Saatnya Songsong
Perjuangan Baru!***



**EDISI 6 -
JUNI 2025**





“Alhamdulillah, selamat atas terpilihnya Ketua Majelis Syura dan Presiden PKS. Selalu bangga atas pergantian pemimpin yang tentu bukan sekadar pergantian kepemimpinan, tapi adalah momen penyegaran semangat perjuangan kita,”

KETUA FPKS JATIM BERI SELAMAT PEMIMPIN BARU PKS: SAATNYA SONGSONG PERJUANGAN BARU!

Ketua Fraksi PKS DPRD Jawa Timur, Lilik Hendarwati, menyampaikan ucapan selamat dan harapan atas terpilihnya Mohammad Sohibul Iman sebagai Ketua Majelis Syura dan Almuzzamil Yusuf sebagai Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang baru. Momentum pergantian pucuk pimpinan ini menurutnya bukan sekadar perubahan struktur, melainkan penyegaran semangat perjuangan PKS ke depan, Rabu (4/6/2025). Lilik menegaskan bahwa kepemimpinan baru ini adalah kesempatan untuk memperluas kiprah dakwah dan pelayanan PKS di tengah masyarakat. Ia menyatakan bahwa Fraksi PKS Jawa Timur siap menyambut dan mendukung arah baru yang akan diusung oleh Sohibul Iman dan Almuzzamil Yusuf.

“Kami siap menyambut kepemimpinan yang baru dengan penuh harapan, siap menapaki medan dakwah dan pelayanan yang makin luas, makin dalam, makin membumi!” lanjutnya. Ia juga menekankan pentingnya kekompakan dan keikhlasan seluruh elemen partai dalam menyambut babak baru kepemimpinan ini. “Dengan barisan yang kokoh, langkah yang terarah, dan hati yang terikat karena Allah, InsyaAllah, PKS akan terus jadi harapan umat dan penggerak perubahan Indonesia ke arah yang lebih baik,” pungkasnya. Pergantian kepemimpinan ini sendiri merupakan bagian dari mekanisme rutin musyawarah dalam tubuh PKS, yang menekankan prinsip kolektif kolegial, kaderisasi, serta kesinambungan visi dan misi perjuangan partai.



FRAKSI PKS DPRD JATIM

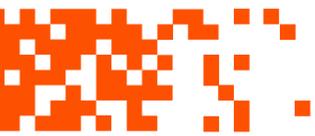
DESAK EVALUASI TOTAL KINERJA OPD DAN BUMD

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Jawa Timur mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis, menyusul realisasi belanja daerah tahun anggaran 2024 yang dinilai masih kurang maksimal. Dengan Juru Bicara Fraksi PKS, Khusnul Khuluk, dalam Rapat Paripurna Pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Jatim 2024, Senin (2/6).

Dari laporan yang disampaikan, tercatat masih ada 3,86 persen belanja daerah yang tidak terserap, setara dengan Rp1,38 miliar. Adapun belanja modal tercatat terserap 93,09 persen, dengan sub-komponen belanja jalan, jaringan, dan irigasi hanya mencapai 78,67 persen.

“Perlu evaluasi total kinerja OPD teknis dengan peningkatan perencanaan, pengawasan, dan pelaksanaan pekerjaan. Ini penting agar serapan belanja modal pada APBD tahun berikutnya bisa meningkat,”





Fraksi PKS juga menyoroti OPD yang realisasi belanjanya masih berada di bawah rata-rata 96,14 persen. Menurut Khuluk, perlu dilakukan mitigasi dan evaluasi program agar ke depan kinerja pengelolaan keuangan daerah tidak hanya mengejar opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), namun benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Terkait pendapatan daerah, Fraksi PKS mengapresiasi capaian pelampauan pendapatan tahun 2024 yang mencapai 110,32 persen atau sebesar Rp3,318 miliar.

Namun demikian, fraksi menilai Pemprov tidak boleh lengah, khususnya dalam menentukan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) ke depan. "Dalam pembahasan Rancangan Perubahan APBD 2025 dan RAPBD 2026, diperlukan kajian penetapan target PAD yang lebih ekspansif, tidak pesimistis, dan tetap memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat serta target pertumbuhan ekonomi sesuai RPJMN 2025–2029," tambah Khuluk.

Fraksi PKS juga menyoroti surplus anggaran dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun 2024 sebesar Rp4,7 triliun. Mereka mendesak agar penggunaan SILPA tersebut ditindaklanjuti dalam APBD Perubahan 2025 dan APBD 2026. Salah satu usulan strategis Fraksi PKS adalah pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) baru di bidang transportasi. BUMD ini dirancang untuk menaungi pengelolaan transportasi seperti Trans Jatim dan Trans Laut agar lebih fleksibel dalam melakukan investasi dan ekspansi usaha. "Selain itu, peningkatan program layanan publik di sektor infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan irigasi juga harus menjadi prioritas," tegas Khuluk. Lebih lanjut, Fraksi PKS juga memberikan perhatian khusus terhadap kinerja BUMD yang dinilai belum optimal dan tidak sesuai harapan.

Meski Pemprov telah memberikan penyertaan modal cukup besar kepada sejumlah BUMD, namun secara umum kontribusinya terhadap pendapatan daerah masih minim. "Fraksi PKS menyarankan agar BUMD yang tidak sehat sebaiknya dimerger. Selain itu, perlu dilakukan koreksi dan evaluasi secara komprehensif terhadap BUMD, terutama yang kontribusinya kecil terhadap PAD," ujarnya. Dua BUMD yang menjadi sorotan Fraksi PKS adalah PT PWU dan PT JGU. Menurut Khuluk, kedua BUMD tersebut diragukan produktivitas dan prospek bisnisnya, sehingga layak untuk dilakukan peninjauan ulang secara menyeluruh terkait keberlanjutannya.



KETUA FRAKSI PKS JATIM TERIMA MAHASISWA PPNS, DUKUNG INOVASI EKSPOR UMKM

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Provinsi Jawa Timur, Lilik Hendarwati, menerima kunjungan salah satu mahasiswa aktif dari Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (PPNS), Muhammad Zaki Raihansyah, pada Senin (2/6). Kunjungan tersebut bertujuan menyampaikan aspirasi sekaligus menyerahkan surat pengantar kepada Komisi VI DPR RI. Zaki, yang sedang mengikuti Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) dalam bidang pengabdian masyarakat, membawa gagasan inovatif terkait model transaksi ekspor untuk pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Indonesia.



Menurut Lilik, tema yang diangkat sangat relevan dengan persoalan riil yang dihadapi UMKM saat ini. “Dia menyampaikan bahwa salah satu kendala yang dihadapi UMKM saat melakukan ekspor adalah ketidakpahaman dalam menyusun MoU atau perjanjian dengan eksportir luar negeri. Hal ini seringkali membuat UMKM terjebak dalam sistem yang merugikan,” jelas Lilik.

Inovasi yang diusulkan Zaki bertujuan membantu UMKM memahami dan mengelola aspek legal serta perlindungan dalam transaksi ekspor. Ia berharap inovasi ini dapat menjadi solusi konkret agar pelaku UMKM tidak lagi dirugikan dalam kerja sama internasional. “Harapan Zaki adalah agar pemerintah bisa memberikan pendampingan yang lebih detil dan menyeluruh kepada UMKM ketika mereka mulai terlibat dalam kegiatan ekspor-impor,” ujar Lilik.

Fraksi PKS Jatim, lanjut Lilik, menerima dan mendukung penuh aspirasi tersebut. Pihaknya juga akan menyampaikan surat pengantar dan aspirasi Zaki kepada rekan-rekan anggota DPR RI, khususnya Komisi VI yang membidangi urusan perdagangan dan UMKM.

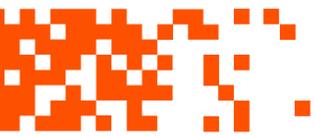
“Kami akan meneruskan aspirasi ini ke DPR pusat. Ini bagian dari komitmen kami untuk memperjuangkan perlindungan dan pemberdayaan UMKM, termasuk mendorong peran aktif pemerintah dalam menyediakan pendampingan hukum dan teknis bagi pelaku ekspor UMKM,” tegasnya. Lilik berharap, kolaborasi antara mahasiswa, pemerintah, dan legislatif ini dapat mendorong lahirnya solusi-solusi inovatif yang berpihak pada kemajuan UMKM Indonesia di pasar global.

TURUT SUKSESKAN 2,3 JUTA PAKET KURBAN, **FRAKSI PKS** **JATIM** SUMBANG SAPI



Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Jawa Timur turut ambil bagian dalam menyukseskan program nasional “Bahagia Berkurban” dengan menyumbangkan satu ekor sapi dalam kegiatan kurban yang digelar oleh DPW PKS Jawa Timur, Sabtu (7/6). Kegiatan ini merupakan bagian dari gerakan besar PKS secara nasional yang berhasil menyalurkan 2,3 juta paket kurban ke seluruh pelosok Indonesia.

Ketua Fraksi PKS Jawa Timur, Lilik Hendarwati, menegaskan bahwa partisipasi Fraksi PKS merupakan bentuk kontribusi langsung dalam menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, Idul Adha bukan hanya momentum spiritual, tapi juga sosial. Kurban menjadi sarana untuk menghadirkan kepedulian dan mempererat hubungan antara wakil rakyat dengan masyarakat yang diwakilinya.



Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian besar yang digelar DPW PKS Jawa Timur. Ketua Panitia Kurban DPW PKS Jatim yang juga Sekretaris Fraksi PKS, Puguh Wiji Pamungkas, menyampaikan bahwa total hewan kurban yang terkumpul tahun ini mencapai 421 ekor sapi dan 1.958 ekor kambing, dengan total distribusi mencapai 175.250 paket daging kurban ke seluruh wilayah Jawa Timur.

“Alhamdulillah, kita melampaui target nasional. Paket kurban ini kami sebar di 38 kabupaten/kota, termasuk kepada warga sekitar kantor DPW, tokoh masyarakat, dan lembaga keagamaan seperti PWNU, PW Muhammadiyah, dan MUI Jawa Timur. Ini adalah wujud cinta dan kontribusi PKS kepada masyarakat,” jelas Puguh.

Ia menambahkan, kegiatan kurban ini bukan sekadar simbolik, tetapi sebagai bagian dari syiar kebaikan dan dakwah sosial PKS yang terus hadir dan melayani masyarakat secara nyata.

“Semoga ini menjadi bagian dari upaya kita menebar kebahagiaan, memperkuat ukhuwah islamiyah, dan memberi manfaat seluas-luasnya bagi rakyat Jawa Timur,” tutupnya.

Melalui kontribusi Fraksi dan struktur partai, PKS Jatim membuktikan bahwa politik bisa menjadi sarana untuk menyalurkan kepedulian, memperkuat solidaritas, dan menyemai kebaikan bersama.



“Hari ini kami dari Fraksi PKS menyampaikan satu hewan kurban untuk turut menyukseskan program nasional PKS. Ada 2,3 juta paket qurban yang kita sebar di seluruh nusantara, dan kami ingin ambil bagian agar masyarakat sekitar bisa ikut merasakan manfaat dan kebahagiaan dari momen Idul Adha ini,” ujar Lilik.



Ketua Fraksi PKS
DPRD Provinsi
Jawa Timur

HJ. LILIK HENDARWATI

KOMISI C
(KEUANGAN)

BADAN ANGGARAN (BANGGAR)
BADAN MUSYAWARAH (BAMUS)



Anggota DPRD Jawa Timur, Lilik Hendarwati, menjelaskan tentang gagasannya tentang “Festival Aset” dalam rangka mendorong optimalisasi aset milik Pemerintah Provinsi. Dalam gagasannya, Lilik menegaskan pentingnya pendekatan kreatif dan kolaboratif dalam memaksimalkan aset publik untuk mendorong Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta menghidupkan ekosistem budaya, wisata, dan ekonomi lokal. Menurut Lilik, saat ini masih banyak aset daerah yang tidak produktif, tidak terkelola dengan baik, atau bahkan dibiarkan terbengkalai. Padahal, jika dikelola secara inovatif, aset-aset tersebut bisa diubah menjadi pusat kegiatan publik yang mampu menggerakkan ekonomi kreatif sekaligus memperkuat identitas daerah. “Ada potensi besar dari bangunan bersejarah, lahan strategis, kawasan wisata, hingga fasilitas publik yang dapat disulap menjadi ruang-ruang festival yang menarik perhatian masyarakat luas maupun investor,” ujar Ketua Fraksi PKS Jatim itu.

Lilik menyampaikan, festivalisasi aset bukan hanya soal mempercantik ruang, tetapi juga menyentuh aspek ekonomi, sosial, dan budaya secara simultan. Festival dapat menjadi pengungkit baru bagi pertumbuhan PAD, sekaligus membuka ruang bagi tumbuhnya UMKM, pelaku seni, komunitas kreatif, dan keterlibatan generasi muda. Ia menyebut model ini sebagai strategi regeneratif dan partisipatif yang selaras dengan semangat pembangunan berkelanjutan. Untuk mendukung gagasan ini, aspek regulasi menjadi perhatian penting. Lilik mendorong inventarisasi menyeluruh terhadap aset-aset potensial sesuai Permendagri No. 19 Tahun 2016, disertai klasifikasi yang jelas apakah aset terbuka, tertutup, tidak produktif, atau sedang dalam sengketa. “Selanjutnya, perlu dilakukan peninjauan ulang terhadap sejumlah Perda untuk membuka ruang inovasi, seperti skema sewa pendek, kerja sama operasional dengan komunitas atau swasta, serta pemanfaatan temporer untuk event seni, budaya, edukasi, dan ekonomi kreatif,” katanya.

A portrait of Lilik Hendarwati, a woman wearing a grey hijab and a dark blue top, sitting in a yellow chair. The background is a blurred indoor setting.

**LILIK HENDARWATI
JELASKAN FESTIVAL
ASET UNTUK
TINGKATKAN PAD
JATIM, PASCA ANJLOK
TRILIUNAN RUPIAH
AKIBAT UU HKPD**

Dalam konteks skema pemanfaatan, Lilik mengusulkan pendekatan seperti Bangun Guna Serah (BGS) dan Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) untuk menjawab tantangan aset yang tidak terpakai atau belum optimal. Ia juga mendorong penyusunan SOP yang digital, transparan, dan akuntabel dalam proses peminjaman atau penyewaan aset milik daerah. Tak kalah penting, ia menekankan perlunya kemudahan perizinan melalui regulasi turunan seperti Pergub atau SK Gubernur, dan sistem satu pintu melalui Dinas Pariwisata atau BPKAD.

Dari sisi teknis, pemetaan dan kurasi aset festival akan melibatkan kolaborasi antara OPD dan komunitas untuk memilih lokasi strategis yang punya nilai sejarah, daya tarik, serta aksesibilitas tinggi. Jenis festival yang digagas sangat beragam, mulai dari kuliner, musik, film, UMKM, fashion, hingga inkubasi ekonomi kreatif dan wisata edukatif berbasis sejarah bangunan. Penjadwalan festival secara rutin juga diharapkan menciptakan agenda tahunan yang mampu menarik wisatawan sekaligus membangun kebanggaan warga.

Kunci keberhasilan dari inisiatif ini menurut Lilik adalah sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan komunitas. Pemerintah bertindak sebagai fasilitator dan penyedia ruang, pelaku usaha sebagai sponsor atau vendor, dan komunitas sebagai penggagas serta kurator program. Kolaborasi tripartit ini diyakini dapat mempercepat akselerasi pengembangan aset daerah berbasis event. "Digitalisasi juga penting. Pembangunan portal online untuk peminjaman aset, kalender event, dan sistem tiket serta donasi daring yang hasilnya masuk sebagai PAD. Promosi akan digencarkan melalui media sosial, kanal resmi pemerintah, dan jejaring influencer lokal agar dapat menjangkau generasi muda dan wisatawan luar daerah," jelas Lilik.

Terakhir, monitoring dan evaluasi secara berkala harus menjadi bagian dari sistem ini. Indikator seperti jumlah event, pengunjung, nilai transaksi, kontribusi terhadap PAD, hingga keterlibatan UMKM perlu dicatat dan diaudit secara transparan oleh OPD terkait bersama BPKAD. Lilik yakin, implementasi Festival Aset akan membawa dampak konkret. Tidak hanya meningkatkan PAD dan menghidupkan aset yang mati suri, tetapi juga membangun partisipasi warga, melestarikan budaya lokal, serta menciptakan citra baru Jawa Timur sebagai provinsi yang kreatif, terbuka, dan kolaboratif. "Aset daerah seharusnya bukan hanya dicatat dalam laporan, tetapi dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Dan festivalisasi bisa jadi jalan terangnya," tegasnya.



JATIM RAWAN PERCERAIAN, LILIK HENDARWATI DESAK KETAHANAN KELUARGA MASUK RPJMD 2025–2030



Anggota DPRD Jawa Timur dari Fraksi PKS, Lilik Hendarwati, mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menjadikan ketahanan keluarga sebagai prioritas utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2030. Dorongan ini disampaikan dalam kapasitasnya sebagai anggota Panitia Khusus (Pansus) RPJMD yang tengah membahas arah pembangunan Jatim lima tahun ke depan. Lilik mengungkapkan keprihatinannya terhadap data perceraian di Jawa Timur yang menempati posisi tertinggi secara nasional. Menurutnya, tingginya angka perceraian bukan sekadar angka statistik, melainkan sinyal kuat bahwa institusi keluarga sebagai unit terkecil masyarakat sedang dalam kondisi rapuh.

“Jika keluarga goyah, maka pembangunan daerah akan berdiri di atas fondasi yang rapuh pula,” tegas Ketua Fraksi PKS Jatim itu. Ia menjelaskan bahwa persoalan ketahanan keluarga di Jawa Timur sangat kompleks dan memiliki akar yang multisektoral. Tekanan ekonomi, pernikahan dini, kekerasan dalam rumah tangga, serta pengaruh media sosial dan gaya hidup instan menjadi pemicu utama keretakan rumah tangga. Kondisi ini, menurutnya, harus ditangani dengan pendekatan lintas program dan kebijakan yang terintegrasi.

“Fraksi PKS, lanjut Lilik, mengusulkan agar isu ketahanan keluarga dimasukkan secara eksplisit sebagai salah satu fokus utama dalam RPJMD 2025–2030. Menurutnya, ketahanan keluarga tidak bisa lagi dianggap sebagai isu domestik semata, karena menyangkut langsung kualitas sumber daya manusia Jawa Timur di masa depan. Lilik juga menyampaikan sejumlah usulan program turunan yang perlu dirancang secara sistematis. Di antaranya, pembentukan pusat konseling keluarga di setiap kabupaten/kota yang dapat berbasis masjid, balai RW, atau PKK.

Selain itu, perlu diselenggarakan kelas pra-nikah dan pasca-nikah yang melibatkan KUA, Dinas Sosial, serta organisasi keagamaan. Pelatihan ekonomi keluarga dan parenting digital bagi keluarga muda juga menjadi bagian penting, disertai revitalisasi peran Posyandu dan PKK sebagai ujung tombak pembinaan keluarga. Gerakan Kampung Keluarga Tangguh juga diusulkan sebagai program kolaboratif antar-OPD. Menurut Lilik, langkah-langkah pencegahan semacam itu akan jauh lebih murah dibandingkan penanganan dampak yang ditimbulkan akibat perceraian, seperti anak-anak putus sekolah, kemiskinan perempuan, kekerasan terhadap anak, hingga meningkatnya angka kriminalitas remaja.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mengimplementasikan program ketahanan keluarga. Pemerintah Provinsi, menurutnya, perlu menggandeng organisasi perempuan, tokoh agama, akademisi, dan media agar pelaksanaannya lebih terarah dan berkelanjutan. “Sebagai wakil rakyat, Fraksi PKS akan terus mengawal agar isu ini tidak tenggelam dalam tumpukan dokumen perencanaan. Ini adalah investasi sosial jangka panjang yang tidak boleh diabaikan,” ujar legislator PKS itu.

Lilik menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa ketahanan keluarga bukan urusan belakang layar. “Ini adalah urusan publik yang akan menentukan arah masa depan Jawa Timur. Kami berdiri bersama rakyat Jawa Timur yang mendambakan rumah tangga yang rukun, anak-anak yang tumbuh dalam cinta, dan masyarakat yang damai lahir batin,” pungkasnya.



Sekretaris Fraksi PKS
DPRD Provinsi
Jawa Timur

**Dr. H. Puguh Wiji
Pamungkas, MM**

KOMISI E

(KESRA)

BADAN KEHORMATAN (BK)





KAJI POLITIK IDENTITAS, PUGUH WIJI PAMUNGKAS RESMI SANDANG DOKTOR, RAIH GELAR CUMLAUDE

Anggota DPRD Jawa Timur dari Fraksi PKS, Puguh Wiji Pamungkas, resmi meraih gelar doktor dari Program Pascasarjana Universitas Merdeka (Unmer) Malang, dengan predikat cumlaude. Gelar doktor ini diraih setelah ia berhasil mempertahankan disertasinya dalam sidang terbuka yang dipimpin langsung oleh Rektor Unmer Malang, Dr. Prihat Assih, S.E., M.Si., Ak., CSRS. Disertasi Puguh mengangkat tema "Politik Identitas Partai Politik: Kajian Realitas Sosial Pemilihan Legislatif di Kabupaten Malang pada Pemilu 2019."

Dalam pemaparannya, Puguh menjelaskan bahwa penelitiannya bertujuan untuk mengkaji bagaimana partai politik, khususnya PKB dan PDI Perjuangan, memanfaatkan identitas keagamaan dan nasionalisme untuk membangun kedekatan dengan pemilih. Ia menggunakan pendekatan kualitatif, melalui wawancara mendalam dan forum diskusi kelompok (FGD).

“Elite partai, calon legislatif, hingga kader menggunakan simbol agama dan kebangsaan dalam sosialisasi dan kampanye politik, baik secara langsung maupun melalui media online, media sosial, dan alat peraga seperti spanduk dan baliho,” jelas legislator PKS itu. Ia juga mengungkapkan bahwa kekuatan politik identitas tidak lepas dari budaya dan nilai-nilai tradisional yang hidup dalam masyarakat.

“Interaksi partai politik dengan pemilih juga dibangun lewat kedekatan budaya lokal, tradisi, dan kebiasaan masyarakat,” imbuhnya. Capaian gelar doktor ini memiliki makna khusus bagi Puguh. Ia mengaku bahwa sejak pertama kali kuliah pada tahun 2003, ia telah menetapkan tiga cita-cita besar: menjadi doktor, naik haji, dan menjadi anggota dewan di usia 40 tahun.

“Alhamdulillah, ketiganya sudah Allah kabulkan. Ini semua berkat doa dan dukungan guru, keluarga, dan teman-teman,” ucapnya penuh haru. Ia juga mengenang masa sulitnya di awal kuliah. “Saya pernah diterima di PTN jalur prestasi, tapi tidak bisa diambil karena tak ada biaya. Baru kuliah tahun 2003, juga sempat kesulitan ekonomi,” kisahnya.

Sidang promosi doktor Puguh dihadiri oleh jajaran akademisi, promotor, dan penyanggah. Bertindak sebagai promotor adalah Prof. Dr. Bonaventura Ngarawula, M.S., dengan ko-promotor Dr. Zainur Rozikin, M.M., M.Pd.. Penyanggah eksternal dalam sidang ini adalah Dr. Muhamad Nur Afandi, M.T., dan hadir pula Prof. Dr. Grahita Chandrarin, M.Si., Ak., CA. selaku Direktur Pascasarjana Unmer Malang.

Dengan predikat cumlaude yang ia raih, Puguh menegaskan komitmennya untuk terus mengembangkan ilmu dan memberikan kontribusi positif, baik di bidang politik, pendidikan, maupun pelayanan kepada masyarakat.

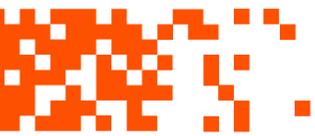
KEKERASAN PADA PEREMPUAN DAN ANAK DI JATIM TINGGI, KOMISI E DPRD DORONG PENGGABUNGAN PERDA

Komisi E DPRD Jawa Timur mendorong percepatan pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Pelindungan Perempuan dan Anak. Langkah ini diambil sebagai respons atas masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Jawa Timur, serta perlunya pembaruan regulasi agar lebih relevan dengan kondisi sosial dan tantangan zaman, terutama di era digital.

Anggota Komisi E DPRD Jatim, Puguh Wiji Pamungkas, yang juga menjadi juru bicara dalam Nota Penjelasan Komisi E, mengungkapkan bahwa data dari SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak) menunjukkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Jawa Timur masih memprihatinkan.

"Tahun 2023 terdapat 972 kasus kekerasan terhadap perempuan dan 1.531 kasus kekerasan terhadap anak. Meski di tahun 2024 angkanya menurun menjadi 771 dan 1.103 kasus, bentuk kekerasan seksual masih menjadi yang paling dominan," ujarnya dalam Rapat Paripurna DPRD Jatim.

"Perlindungan terhadap perempuan dan anak tidak cukup hanya saat terjadi kekerasan, tetapi juga harus meliputi pencegahan dan pemulihan. Korban butuh layanan yang terintegrasi secara fisik, psikologis, dan sosial," tegasnya.



Selain kekerasan seksual, Puguh juga menyoroti praktik perkawinan anak yang masih tinggi di Jawa Timur. Berdasarkan data dari Pengadilan Tinggi Agama, angka dispensasi kawin sempat melonjak tajam pada 2020 menjadi 17.214 kasus pasca perubahan batas usia minimal menikah dari 16 menjadi 19 tahun. Walaupun jumlah itu terus menurun hingga 8.753 kasus pada tahun 2024, angkanya tetap menunjukkan perlunya langkah serius dari pemerintah daerah.

Di sisi lain, perkembangan teknologi turut membawa tantangan baru dalam perlindungan anak. Berdasarkan studi Disrupting Harm tahun 2022, sebanyak 41% anak dan remaja di Indonesia menyembunyikan usia mereka saat online, membuat mereka lebih rentan terhadap predator digital dan kekerasan seksual daring. Survei U-Report pada 2019 juga mencatat bahwa 45% responden anak muda usia 14–24 tahun pernah mengalami cyberbullying. “Anak-anak dan remaja kita adalah pengguna aktif media digital. Ini membuka peluang besar, tapi juga risiko yang tidak kalah besar. Raperda ini perlu mengatur perlindungan yang mencakup ruang digital,” jelas Puguh.

Puguh menambahkan, regulasi yang saat ini berlaku, yaitu Perda Nomor 16 Tahun 2012 dan Perda Nomor 2 Tahun 2014, sudah tidak memadai dan perlu diganti dengan satu regulasi terpadu. Penggabungan dua perda ini dinilai akan menciptakan sistem perlindungan yang lebih komprehensif, efisien, dan adaptif terhadap perubahan sosial maupun teknologi. Raperda yang diusulkan akan mencakup sejumlah aspek penting, seperti tugas dan wewenang pemerintah daerah, perencanaan dan penyelenggaraan perlindungan, kelembagaan, sistem informasi, kerja sama daerah, partisipasi masyarakat, hingga pembinaan dan pengawasan. Penguatan koordinasi lintas lembaga juga menjadi salah satu poin utama yang diharapkan dapat meningkatkan efektivitas perlindungan.

Raperda ini juga disusun dengan mengacu pada berbagai regulasi nasional terbaru, di antaranya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak, serta Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2025 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelindungan Perempuan dan Anak. Dengan regulasi baru yang menyatukan perlindungan perempuan dan anak dalam satu payung hukum, diharapkan upaya penanganan, pencegahan, dan pemulihan bisa dilakukan secara lebih cepat, tepat, dan menyeluruh di Provinsi Jawa Timur.



Bendahara Fraksi PKS
DPRD Provinsi
Jawa Timur

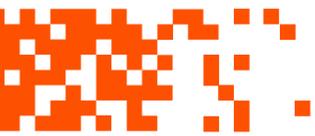
**HARISANDI SAVARI,
S.PT, ST**

KOMISI D

(PEMBANGUNAN)

BADAN MUSYAWARAH (BAMUS)





**HARISANDI
SAVARI:
SURAMADU
BELUM CAPAI
TUJUAN
AWAL,
MADURA
MASIH
TERMISKIN**

Anggota Komisi D DPRD Jawa Timur, Harisandi Savari, menyoroti ketimpangan pembangunan di Madura meski Jembatan Suramadu telah beroperasi sejak 2009. Ia menilai, jembatan sepanjang 5.438 meter itu belum mencapai tujuan awal pembangunannya, yakni untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di Pulau Garam. Menurut Harisandi, kehadiran Jembatan Suramadu memang berhasil meningkatkan aksesibilitas antara Surabaya dan Madura. Namun, manfaat ekonomi yang diharapkan belum sepenuhnya dirasakan masyarakat. "Empat kabupaten di Madura masih tercatat sebagai daerah termiskin di Jawa Timur," ungkapnya. Ia menekankan bahwa untuk mengatasi kemiskinan, perlu dibuka lapangan pekerjaan secara luas. "Salah satu solusinya adalah menghadirkan investasi yang dibarengi dengan kesiapan sumber daya manusia (SDM)," ujarnya.

Namun, tantangan utama yang dihadapi Madura saat ini adalah persoalan infrastruktur. Menurutnya, persepsi tentang investasi di Madura masih negatif, sehingga membuat investor enggan menanamkan modalnya. "Investor masih menilai Madura sebagai daerah yang belum kondusif untuk pengembangan usaha.

Padahal, jika mereka bisa melibatkan masyarakat, efeknya akan sangat positif bagi peningkatan kesejahteraan," jelas Harisandi. Meskipun manfaat Jembatan Suramadu belum optimal, Harisandi mengakui ada dampak positif yang mulai terlihat. Di antaranya adalah pertumbuhan pelaku UMKM dan peningkatan produk domestik regional bruto (PDRB) Madura.

Namun ia mengingatkan, selain mendorong manfaat ekonomi, pemerintah juga harus fokus pada perawatan dan pengamanan jembatan. Harisandi berharap pemerintah lebih serius memperbaiki infrastruktur dan menyiapkan SDM agar kehadiran Suramadu bisa benar-benar menjadi motor penggerak kemajuan Madura.

"Kami tidak hanya memperjuangkan aspek perawatan, tapi juga keamanannya. Jembatan Suramadu harus tetap menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk datang ke Madura," tegasnya.

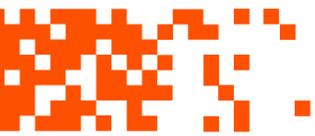


KHOFIFAH GELONTORKAN RP7,62 M UNTUK BANGKALAN, HARISANDI DPRD JATIM: LANGKAH BAIK ENTASKAN KEMISKINAN DI MADURA



Upaya pengentasan kemiskinan di Madura mendapat perhatian khusus dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah mengucurkan bantuan sebesar Rp7,62 miliar untuk masyarakat Bangkalan, sebagai bagian dari program pembangunan berkelanjutan di wilayah Pulau Garam. Langkah ini pun mendapat apresiasi dari anggota Komisi D DPRD Jawa Timur, Harisandi Savari, yang menilai bantuan tersebut sebagai awal yang positif dalam mewujudkan komitmen pengentasan kemiskinan di Madura.

“Tentunya ini langkah baik yang patut diapresiasi. Kami berharap ke depan akan ada lebih banyak program terukur dan berkelanjutan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat,” ujar Harisandi. Politisi PKS yang juga Ketua Kadin Pamekasan ini menyampaikan bahwa dirinya telah menemui Gubernur Khofifah untuk mengingatkan janji saat Pilgub lalu terkait fokus pembangunan di Madura



“Kami di DPRD Jatim siap mendukung setiap program yang benar-benar berpihak pada rakyat, terutama di wilayah-wilayah yang selama ini masih tertinggal. Madura layak mendapatkan perhatian dan kebijakan afirmatif seperti ini,” pungkasnya



“Saat saya temui, Bu Khofifah menyampaikan bahwa periode pertama difokuskan pada pembangunan wilayah tapal kuda. Sementara periode kedua ini, giliran Madura menjadi prioritas,” ungkap mantan jurnalis itu. Salah satu langkah nyata yang sudah dilakukan gubernur adalah peninjauan langsung dan normalisasi Sungai Jombang di Pamekasan, yang selama ini menjadi titik banjir dan permasalahan tahunan bagi masyarakat sekitar.

“Langkah ini bukan hanya soal infrastruktur, tapi soal keberpihakan. Ketika akses air tertata dan wilayah bebas banjir, maka aktivitas ekonomi dan keseharian warga bisa berjalan lebih baik,” terang legislator PKS itu. Meski beberapa kabupaten di Madura menunjukkan tren penurunan angka kemiskinan pada 2024, secara keseluruhan wilayah ini masih menghadapi tantangan besar. Fluktuasi data menandakan perlunya pendekatan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan.

Harisandi menekankan bahwa infrastruktur adalah fondasi utama dalam menekan kemiskinan. Dengan jalan yang layak, penanganan banjir yang efektif, dan bantuan sosial yang tepat sasaran, masyarakat Madura akan memiliki akses yang lebih luas terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi.



Anggota Fraksi PKS
DPRD Provinsi
Jawa Timur

H AGUS CAHYONO, SHI, MHI

KOMISI A
(PEMERINTAHAN)

**BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN
DAERAH (BAPEMPERDA)**





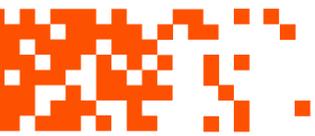
Wakil Ketua Komisi A DPRD Jawa Timur, Agus Cahyono, mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk meningkatkan kewaspadaan menyusul meningkatnya jumlah titik banjir di sejumlah daerah, seperti Gresik dan Jombang.

Menurutnya, penanganan banjir di Jatim tidak bisa lagi dilakukan dengan pendekatan biasa, karena tren bencana ini makin memburuk dari waktu ke waktu. "Pemprov Jatim harus lebih serius. Bahkan, dalam situasi cuaca ekstrem seperti sekarang ini, perlu dipertimbangkan penetapan status darurat bencana, terutama di titik-titik rawan banjir," ujar Agus.

Agus menegaskan bahwa banjir telah menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, maupun infrastruktur. Ia menyoroti belum adanya mekanisme kompensasi yang jelas bagi warga yang mengalami kerusakan rumah, kehilangan harta benda, atau gangguan aktivitas ekonomi akibat banjir.



**TITIK BANJIR DI
JATIM MAKIN
BANYAK, AGUS
CAHYONO MINTA
PEMPROV SIAP
SIAGA**

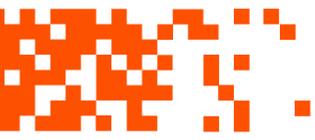


“Selama ini, masyarakat yang terdampak langsung banjir tidak mendapatkan ganti rugi dari pemerintah. Mereka menanggung sendiri kerugian yang jumlahnya tidak sedikit. Ini yang harus jadi perhatian serius,” kata legislator PKS tersebut. Agus juga mendorong Pemprov untuk melakukan langkah-langkah antisipatif dengan memperkuat koordinasi bersama BMKG dan instansi terkait lainnya. Deteksi dini terhadap potensi banjir, penyebaran informasi kepada warga, hingga penyediaan fasilitas darurat seperti dapur umum, harus segera dilakukan secara sistematis.

“Fase-fase tanggap darurat seperti evakuasi, penyediaan makanan, dan kebersihan lingkungan pascabanjir memang sudah dilakukan. Tapi kerusakan pribadi, seperti peralatan rumah tangga dan kehilangan aset warga, belum pernah disentuh,” jelasnya. Ia menilai, salah satu penyebab semakin meluasnya banjir adalah kerusakan lingkungan yang tidak tertangani dengan baik, seperti pendangkalan sungai, penyempitan saluran air, serta perilaku masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan.

“Pemerintah perlu menggalakkan gerakan khusus dan edukasi masif tentang kesadaran lingkungan. Ini harus disuarakan terus-menerus agar masyarakat benar-benar peduli,” tegas Agus. Agus juga mengingatkan bahwa penanganan banjir harus dikaitkan dengan visi besar Jawa Timur sebagai Gerbang Baru Nusantara. Ia khawatir, jika bencana banjir tidak tertangani serius, maka akan berdampak pada iklim investasi di daerah.

“Kalau daerah-daerah rawan banjir terus dibiarkan, siapa yang mau berinvestasi? Bencana bisa menghancurkan usaha UMKM, mengganggu bisnis lokal, dan membuat investor enggan menanamkan modal,” pungkasnya. Dengan berbagai kondisi tersebut, Agus Cahyono berharap Pemprov Jatim bisa mengalokasikan anggaran khusus dari pos belanja tak terduga untuk penanganan banjir, serta menjadikan isu ini sebagai prioritas utama dalam agenda pembangunan daerah.



SENGKETA 13 PULAU ANTARA TRENGGALEK DAN TULUNGAGUNG, AGUS CAHYONO MINTA GUBERNUR SEGERA TURUN TANGAN

Wakil Ketua Komisi A DPRD Jawa Timur, Agus Cahyono, angkat bicara terkait sengketa kepemilikan 13 pulau antara Kabupaten Trenggalek dan Kabupaten Tulungagung yang berada di wilayah perairan Kecamatan Watulimo. Sengketa ini mencuat setelah adanya perbedaan data dalam dokumen administrasi yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) Provinsi Jawa Timur.

Agus menilai sengketa ini sebenarnya tidak sebesar konflik wilayah seperti yang terjadi antara Aceh dan Sumatera Utara. "Ini hanya persoalan antar kabupaten yang seharusnya bisa diselesaikan di tingkat provinsi. Tidak perlu dibesar-besarkan," ujarnya anggota DPRD dari dapil 9 yang meliputi Trenggalek, Ponorogo, Pacitan, Magetan, dan Ngawi.

Menurut legislator PKS ini, akar persoalan muncul setelah Mendagri pada tahun 2022 menetapkan 13 pulau tersebut masuk dalam administrasi Kabupaten Tulungagung. Namun setahun kemudian, dalam RT/RW Provinsi Jawa Timur yang disusun tahun 2023, pulau-pulau itu justru dicantumkan masuk ke wilayah Trenggalek. "Ini yang saya nilai sebagai pemantik munculnya sengketa. Padahal sebelumnya tidak ada persoalan, bahkan tidak ada nilai ekonomi yang signifikan dari keberadaan 13 pulau tersebut, berbeda dengan kasus Aceh-Sumut yang mengandung potensi tambang dan sumber daya alam," ungkapnya.

“Di perjalanan diskusi kemarin, kita tidak membahas tentang sanksi, karena itu di luar kewenangan Pemprov Jawa Timur. Penegakan hukum terkait judol dan pinjol itu ada di instansi lain. Kita lebih kepada antisipasi, lebih kepada pencegahan, dengan literasi, bekerja sama dengan beberapa instansi yang relevan untuk melakukan edukasi kepada masyarakat Jawa Timur”.



Agus menambahkan, klaim Trenggalek yang menyatakan 13 pulau tersebut sebagai wilayahnya bukan tanpa dasar, melainkan merujuk pada RT/RW Provinsi Jawa Timur. Sayangnya, hal ini justru bertentangan dengan keputusan Mendagri yang terbit lebih dulu.

“Trenggalek tidak salah mengklaim, karena mengacu pada RT/RW provinsi. Tapi di sisi lain, keputusan Mendagri justru menyebutkan pulau-pulau itu milik Tulungagung. Di sinilah letak kesalahan koordinasi yang harus segera diselesaikan oleh Pemprov Jatim,” tegasnya.

Lebih lanjut, Agus mengungkapkan bahwa saat ini dokumen revisi RT/RW Kabupaten Trenggalek telah berada di pemerintah pusat namun belum disetujui. Menurutnya, konflik ini turut menghambat pengesahan RT/RW baru Trenggalek yang dibutuhkan untuk mendukung pelayanan publik dan pembangunan ke depan.

“Gubernur harus segera turun tangan dan melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat. Termasuk mempertanyakan dasar penyusunan RT/RW provinsi yang menyelisihi keputusan Mendagri. Jika tidak segera diselesaikan, ini akan menghambat pembangunan daerah,” pungkasnya.



Anggota Fraksi PKS
DPRD Provinsi
Jawa Timur

DRS. H. M KHUSNUL KHULUK

KOMISI B

(PEREKONOMIAN)

BADAN ANGGARAN (BANGGAR)



KHUSNUL KHULUK MINTA BIROKRASI BBM SUBSIDI UNTUK NELAYAN DIPANGKAS: BANYAK YANG KESULITAN AKSES SOLAR

Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur, Khusnul Khuluk, meminta pemerintah untuk segera mengevaluasi dan memangkas berbagai birokrasi yang menyulitkan nelayan dalam mengakses BBM bersubsidi. Menurut politisi PKS asal Lumajang ini, keluhan nelayan terkait sulitnya mendapatkan solar subsidi semakin sering disampaikan di berbagai wilayah pesisir Jawa Timur.

Ia menambahkan, salah satu masalah utama yang dihadapi nelayan adalah kerumitan dalam memperoleh BBM subsidi, terutama bagi mereka yang memiliki kapal berkapasitas 12 Gross Ton (GT). "Di lapangan, nelayan dengan kapal 12 GT menghadapi proses birokrasi yang terlalu rumit. Saya mohon kepada pemerintah untuk mempermudah," ungkap legislator PKS itu.



"Saya minta semua birokrasi bagi nelayan untuk mendapatkan BBM subsidi dipangkas. Mereka jangan sampai dipersulit," ujar Khusnul.

Khusnul juga menyoroti adanya pembatasan pembelian BBM subsidi. Dulu, nelayan masih diperbolehkan membeli solar menggunakan jeriken, namun aturan tersebut kini telah dihapuskan.

“Saya minta kebijakan ini dievaluasi atau dihapus. Nelayan sangat membutuhkan BBM subsidi agar tetap bisa melaut,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menyinggung kebijakan terbaru yang mewajibkan nelayan memiliki surat rekomendasi dari Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Perikanan (Sudin KPKP) untuk membeli solar subsidi. Surat tersebut dilengkapi dengan barcode yang harus dipindai saat transaksi di SPBU. Di dalam surat rekomendasi juga tercantum kuota solar per bulan, disesuaikan dengan kapasitas mesin perahu masing-masing nelayan.

“Secara prinsip nelayan tidak keberatan. Tapi di lapangan, banyak masalah muncul. Misalnya, barcode dalam surat rekomendasi sering kali sudah kadaluwarsa, padahal jatah solar mereka belum habis. Karena masa berlaku barcode hanya tiga bulan,” jelas Anggota Komisi B DPRD Jatim itu.

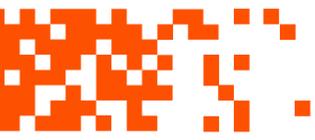
Khusnul mendesak pemerintah segera mengevaluasi kebijakan tersebut agar nelayan tidak semakin terbebani. Ia menekankan pentingnya kebijakan yang berpihak dan tidak menyulitkan pelaku usaha sektor kelautan yang telah lama menjadi tulang punggung ekonomi pesisir di Jawa Timur.

OPTIMIS JATIM BISA SWASEMBADA PANGAN, KHUSNUL KHULUK DPRD JATIM MINTA PEMPROV ATASI IMPORTIR NAKAL

Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur dari Fraksi PKS, Khusnul Khuluk, menyatakan optimisme bahwa Jawa Timur mampu mencapai swasembada pangan, khususnya beras, dalam waktu dekat. Namun ia menekankan, keberhasilan ini sangat bergantung pada keseriusan pemerintah daerah serta ketegasan menghadapi praktik impor pangan yang tidak perlu.

Menurutnya, Kementerian Pertanian telah menyatakan komitmennya mendukung swasembada dengan menambah bantuan sarana dan prasarana, seperti alat mesin pertanian (alsintan), pupuk, dan bibit unggul. Namun, dukungan dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota juga sangat dibutuhkan.

“Kalau pemerintahannya serius, dan betul-betul ingin stop impor, saya yakin bisa. Tapi persoalannya, importir ini banyak yang bermain, karena ada cuan di sana. Nah, ini yang harus ditertibkan,”
ujar Khusnul.



“Kementan sudah siap bantu. Tapi kalau tidak ada sinergi dengan dinas-dinas di kabupaten/kota, target 12 juta ton (beras) itu sulit tercapai,” jelasnya. Khusnul juga menyoroti kondisi di lapangan yang paradoks. Meski Jawa Timur mengalami panen raya pada Januari–Juni dan produksi beras dinyatakan surplus, harga beras masih tinggi di pasaran.

“Ini kan selalu jadi dilema. Kalau harga beras murah, petani yang protes karena gabah murah. Tapi kalau beras mahal, masyarakat yang teriak. Makanya semuanya harus tertib, patuhi aturan soal harga eceran tertinggi (HET),” tegasnya. Sebagai petani aktif, Khusnul mengungkapkan tantangan besar yang dihadapi petani di lapangan, terutama dalam hal produktivitas dan keuntungan yang minim.

“Di Lumajang, hasil gabah hanya sekitar 4,2 sampai 4,5 ton per hektar. Itu pun hasil kotor. Jadi sangat berat untuk dapat untung. Kalau tidak ada kepastian harga dan akses pupuk, ya petani bisa mundur,” katanya. Ia menilai rendahnya insentif juga membuat anak muda enggan terjun ke dunia pertanian. “Petani kita sekarang didominasi usia tua. Anak-anak muda lebih pilih jualan kopi. Program petani milenial belum efektif, khususnya di Jawa.”

Dalam upaya memperluas lahan tanam, Khusnul juga mendorong pemanfaatan lahan-lahan perhutani melalui skema kehutanan sosial. Namun, ia mengingatkan pentingnya menjaga ekosistem agar pemanfaatan lahan tidak merusak lingkungan. “Kalau lahan Perhutani dibuka untuk pertanian, harus ada pengawasan ketat agar ekosistem tetap terjaga. Jangan sampai swasembada pangan mengorbankan lingkungan,” tambahnya.

Sebagai bagian dari partai koalisi pemerintah, Khusnul menyatakan optimisme terhadap arah kebijakan Presiden Prabowo yang dianggap punya komitmen kuat terhadap sektor pertanian. “Pak Prabowo sudah terbukti turun ke masyarakat. Sekarang tinggal dinas-dinas di bawahnya ini, terutama di provinsi, harus punya semangat yang sama. Jangan sampai semangatnya hanya di pusat, tapi daerahnya lemah,” tandasnya.

Dengan sinergi yang kuat, pengetatan pengawasan impor, serta perbaikan kesejahteraan petani, Khusnul yakin Jawa Timur bisa menjadi daerah percontohan dalam mewujudkan swasembada pangan nasional.

FRAKSI PKS JAWA TIMUR



www.fraksipksjatim.id



fraksipksjatim